

**PENGARUH ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

HARU MAULIA GINIYUNG PRATIDANA
B200120044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017.”

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:-

HARU MAULIA GINIYUNG PRATIDANA
B 200 120 044

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Drs. Eko Sugiyanto, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015- 2017

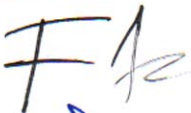
Yang ditulis oleh :

HARU MAULIA GINIYUNG PRATIDANA
B 200 120 044

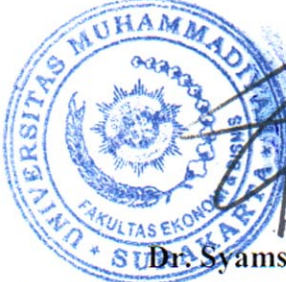
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal, 12 / 11 / 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Ahyani, S.E., M.Si.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak.
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2019

Penulis



HARU MAULIA GINIYUNG. P

B200120044

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-
2017**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Dengan periode pengambilan sampel dari tahun 2015 hingga 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah linier berganda dengan *software* bantuan SPSS 25 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of regional original income, general allocation funds, and special allocation funds, on regional expenditure. The samples used in this study were 35 regency and city governments in Central Java. With the sampling period from 2015 to 2017. This research method uses quantitative research methods with purposive sampling technique. The analysis technique used is multiple linear with SPSS 25 help software. The results of the study show that the Regional Original Revenue, General Allocation Funds and Allocation Funds specifically influence the Regional Expenditures.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Regional Expenditures.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat (Hasan, 2012).

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis-jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim (2002:68), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 1) Belanja Tidak Langsung (BTL). Kelompok BTL adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung (BL). Kelompok BL adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

2. METODE

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. (Silalahi, 2010: 77) dalam Yawa dan Runtu (2015).

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa Tengah dari tahun 2015-2017. Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari populasi. Berdasarkan karakteristiknya yang di pakai sebagai sampel adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dimana kabupaten dan kota tersebut menerbitkan laporan realisasi APBD tahun 2015-

2017. Metode pemilihan sampel yang di gunakan adalah total sampling (sampling jenuh) yaitu keseluruhan jumlah populasi dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001197
	Std. Deviation	104013134047.74782000
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.044
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data sekunder diolah penulis, 2019

Dari Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikan pada $0,200 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-102178844 951.189	4977409081 1.257		-2.053	.043		
PAD	1.432	.071	.434	20.074	.000	.830	1.205
DAK	.875	.132	.171	6.634	.000	.584	1.712
DAU	1.574	.069	.627	22.720	.000	.508	1.969

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10% dan nilai *VIF* kurang dari 10 dari setiap independennya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	49505645197.329	32490308502.706		1.524	.131
PAD	.098	.047	.220	2.104	.038
DAK	-.119	.086	-.172	-1.378	.171
DAU	.042	.045	.125	.934	.353

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2019.

Pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut terjadi heteroskedastisitas, maka data dioutlayer sebanyak 3 (siswa 102) karena terkena heteroskedastisitas.

3.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.970	105593170847.22087	2.022

Sumber: Data Sekunder diolah penulis, 2019.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai DW terletak antara DU dan 4-DU ($1,783 < 2,022 < 2,217$), dapat disimpulkan model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

3.1.5 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	36333581706813507000000 000.000	3	12111193902271170000 000000.000	1086.21 4	.000 ^b
Residual	10926919374978968000000 00.000	9 8	11149917729570375000 000.000		
Total	37426273644311403000000 000.000	101			

Sumber: Data Sekunder diolah penulis, 2019

Pada hasil dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAK dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3.1.6 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistil t)

Tabel 6. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-102178844951.189	49774090811.257		-2.053	.043
PAD	1.432	.071	.434	20.074	.000
DAK	.875	.132	.171	6.634	.000
DAU	1.574	.069	.627	22.720	.000

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2019.

Dari hasil persamaan di atas koefisiensi regresi PAD menunjukkan bahwa untuk PAD diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima yang berarti PAD berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.

Hasil uji signifikansi pada Tabel menunjukkan bahwa untuk DAK diperoleh t statistik sebesar 6,634 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima yang berarti DAK berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.

Hasil uji signifikansi pada Tabel menunjukkan bahwa untuk DAU diperoleh t statistik sebesar 22,720 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima yang berarti DAU berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.

3.1.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.985 ^a	.971	.970	105593170847.22087

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Pada tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dengan *adjusted- R^2* sebesar 0,970. Hal ini menunjukkan bahwa 97% variasi variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAK dan DAU

sedangkan sisanya yaitu 3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 20,074$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah Otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri. Memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang nantinya akan menambah pendapatan asli daerah. Dengan begitu peningkatan investasi modal diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Kesit (2004) meneliti tentang dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3.2.2 Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 6,634$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, artinya DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan DAK merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat ini dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas Nasional. Pemerintah Daerah pun harus sebaik mungkin mengelola dana tersebut demi pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan pemanfaatan DAK yang optimal dan dengan sesuai sasaran, itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Daerah. Daerah-daerah yang kekurangan modal akan bisa terbantu, sehingga efek dari DAK akan membantu menciptakan kombinasi input produksi yang lebih optimal. untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAK untuk

daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Semakin banyak DAK yang diterima maka akan semakin tinggi pula Belanja Daerah yang direalisasikan. Bayura (2009) juga meneliti tentang pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

3.2.3 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 22,720$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, artinya DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan lewat DAU maka daerah-daerah yang kekurangan modal akan bisa terbantu, sehingga efek dari DAU akan membantu menciptakan kombinasi input produksi yang lebih optimal. Untuk suatu daerah kabupaten/kota tentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Semakin banyak DAU yang diterima maka akan semakin tinggi pula Belanja Daerah yang direalisasikan. Syukriy dan Halim (2003) pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara terpisah dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan tersebut, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) PAD berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya semakin besar PAD semakin besar juga Belanja Daerah suatu daerah.
- 2) DAU berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya dengan semakin tinggi DAU berdampak semakin besar Belanja Daerah.
- 3) DAK berpengaruh (secara statistik) terhadap Belanja Daerah, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya pemberian DAK yang semakin

tinggi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akan meningkatkan pemerataan pembangun yang seragam dengan program Nasional.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian analisis data pembahasan dan simpulan yang telah diambil maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Tengah, sehingga akan memberikan hasil yang lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya.
- 2) Bagi peneliti mendatang hendaknya periode penelitian lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya 3 tahun, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.
- 3) Bagi peneliti mendatang hendaknya melibatkan variabel lain karena dasarnya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah, seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Devita dkk. 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, ISSN: 2338- 4603, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Bastian, Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta. YKPN
- Jolianis. 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ISSN: 2085-1057, STKIP PGRI Sumatera Barat
- Kesit Bambang Prakosa. 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), ISSN: 1410 – 2420
- Luluk Atika Rahmawati. 2015, *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Maimunah, M. 2006, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada*

- Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 1-7
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Mirani dkk. 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Bitung tahun 2003-2015, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rihfenti Ernayani. 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta